



Hal 9 | ■ berikan upah

tersebut menurutnya telah lama disuarakan DPRD Kota Pontianak kepada pemerintah.

“DPRD setuju dengan kenaikan honorer ini karena sudah lama disuarakan,” ucap Mujiono.

Mujiono meminta dengan kenaikan insentif itu dibarengi dengan peningkatan kinerja dari para tenaga honor di sekolah. Adanya kenaikan kinerja, maka kualitas

pendidikan dari Kota Pontianak juga akan meningkat.

Dirinya juga mengapresiasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menaikkan alokasi dana BOS untuk memberikan upah honorer di sekolah dari 15 persen menjadi 50 persen.

“Jika dulu dibatasi sehingga honor yang diberikan itu menjadi minim dan tidak sesuai standar, bahkan un-

tuk standar UMK saja tidak tercapai,” katanya.

Dikatakannya, dengan adanya perubahan kebijakan dari Kementerian Pendidikan terkait dana BOS menjadi peluang untuk sekolah untuk lebih memaksimalkan kinerja honor di sekolah tentunya berkaitan dengan upah.

Ia berharap di tingkat bawah tidak ada lagi hambatan untuk memberikan

upah sesuai UMK karena kebijakan itu menjadi peluang bagi sekolah menjadi lebih fleksibel dalam memberikan honor bagi tenaga honorer.

“Jika honorer sudah naik maka yang perlu dilakukan pemerintah adalah memberikan pendidikan dan pelatihan bagi guru honorer agar kompetensinya meningkat,” pungkasnya. **(din)**